PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 64 TAHUN 2021 BN 2021/NO 1261 , 34 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2022 .

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah :

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 17 Tahun 2003, UU No 33 Tahun 2004, UU No 39 Tahun 2008, UU NO 7 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2021, Perpres No 48 Tahun 2015,Perpres No 85 Tahun 2021, PMK No 156/PMK.07/2008, Permendag No 46 Tahun 2020, Permendag No 80 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :

  Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi. ebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur meliputi: a. pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; dan b. pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan diundangkan pada tanggal 9 November 2021.